

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Kabupaten Malaka merupakan salah satu Kabupaten muda yang berdiri pada Tahun 2013, yang sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Pemerintahan Kabupaten Belu. Sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Malaka berbatasan langsung darat dan laut dengan dua Negara yakni Republic Democratic Timor Leste (RDTL) dan Australia.

A. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Adapun Landasan Hukum yang mengatur tentang Pembentukan Perangkat Daerah serta menjadi acuan dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037.
4. Peraturan Bupati Malaka Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka.

B. Data Geografis Wilayah

1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten dari 22 kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terletak di pulau Timor. Secara geografis Kabupaten Malaka terletak di bagian paling timur dan berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Secara astronomis, wilayah Kabupaten Malaka terletak antara koordinat dan $9^{\circ} 18' 7.19''$ LS – $9^{\circ} 47' 26.68''$ LS dan $124^{\circ} 38' 32.17''$ BT– $125^{\circ} 5' 21.38''$ BT.

Kabupaten Malaka secara geografis mempunyai wilayah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Nanaet Dubesi dan Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Laut Timor
- Sebelah timur : berbatasan dengan wilayah Negara Republik Demokratik TimorLeste
- Sebelah barat : berbatasan dengan wilayah Kecamatan Insana, Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan wilayah Kecamatan Kokbaun, Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Toianas, Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tabel 1.1.
Luas Kecamatan di Kabupaten Malaka

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Kobalima Timur	4	96.11	8.28
2	Laen Manen	9	94.02	8.10
3	Io Kufeu	7	67.79	5.84

4	Kobalima	8	120.95	10.42
5	Malaka Timur	6	83.28	7.18
6	Rinhat	20	151.72	13.07
7	Wewiku	12	97.90	8.44
8	Botin Leobebe	5	39.03	3.36
9	Sasitamean	9	65.48	5.64
10	Malaka Barat	16	87.41	7.53
11	Weliman	14	88.25	7.60
12	Malaka Tengah	17	168.69	14.53
	Jumlah	127	116.063	100.00

Sumber : Malaka Dalam Angka (Data diolah)

Jumlah penduduk Kabupaten Malaka adalah 189.046 jiwa (Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2016). Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah kecamatan Malaka Tengah yakni sebanyak 35.174 jiwa, sedangkan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Botin Loebebe dengan jumlah penduduk sebanyak 7.000 jiwa.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malaka

No	Nama Kecamatan	Penduduk (jiwa)
		2016
1	Kobalima Timur	7.227
2	Laen Manen	14.394
3	Io Kufeu	9.190
4	Kobalima	18.411

5	Malaka Timur	9.982
6	Rinhat	13.812
7	Wewiku	21.763
8	Botin Leobebe	7.000
9	Sasitamean	8.788
10	Malaka Barat	21.329
11	Weliman	21.976
12	Malaka Tengah	35.174
Jumlah		189.046

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2016

2. Topografi Kabupaten Malaka

Topografi Kabupaten Malaka bervariasi antara ketinggian 0 sampai dengan ± 806 m.dpl dan ketinggian 0-269 m.dpl. Ketinggian 0-269 m.dpl. mendominasi wilayah selatan Kabupaten Malaka yang meliputi Kecamatan Wewiku, Malaka Barat, sebagian Malaka Tengah dan Kobalima. Pada bagian tengah wilayah ini terdiri dari area dengan dataran sedang (270-537 m.dpl), pada sebagian Kecamatan Weliman, Malaka Tengah, Kobalima, dan Botin Loebele.

Dataran tinggi (538-806 m.dpl) di Kabupaten Malaka meliputi kawasan bagian utara, yakni Kecamatan Laen Manen, Io Kufeu, sebagian Kecamatan Sasitamean, Malaka Timur dan Kobalima Timur. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Malaka merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan dengan sungai-sungai yang mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lerengnya. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Malaka mengalir dari bagian utara dan bermuara di Laut Timor. (Kali Benenai, Kali Babulu dan motabaen Boas)

Pada umumnya kemiringan lahan wilayah Kabupaten Malaka didominasi kemiringan antara 0–15%. Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Malaka akan dikelompokkan menjadi 4 kelas dengan masing-masing lokasi sebagai berikut:

- 1) Daerah dengan kemiringan lereng 0-8 %, yang merupakan dataran landai, terdapat di pesisir pantai selatan yakni Kecamatan Wewiku, Malaka Barat, sebagian besar Kecamatan Weliman, Malaka Tengah dan Kobalima.
- 2) Daerah kemiringan lereng 8-15%, merupakan daerah datar yang meliputi Kecamatan Kobalima, Kobalima Timur, kemudian sebagian Kecamatan Malaka Timur, Laen Manen, Kecamatan Rinhat, Malaka Tengah dan Botin Leobele.
- 3) Daerah dengan kemiringan lereng 15-30%, yaitu daerah landai atau bergelombang yang meliputi daerah lembah yang terletak diantara pegunungan, terdapat di sebagian besar Kecamatan Sasitamean dan Kecamatan Io Kufeu, sebagian Kobalima Timur, Malaka Timur, Rinhat dan Botin Leobele.
- 4) Daerah dengan kemiringan lereng 30-45%, yaitu daerah yang bergelombang dan berbukit terdapat sedikit di kecamatan Malaka Timur, Sasitamean dan Rinhat.

Rincian keterangannya wilayah Kabupaten Malaka dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 1.3
Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Malaka

No	Kemiringan lereng	Luas	
		Ha	%
1	0 - 3%	29.881,96	26,77
2	3 - 8%	20.809,91	18,65
3	8 - 15%	37.258,60	33,38
4	15 - 25%	18.843,97	16,88
5	25 - 40%	4.758,49	4,26
6	>40%	54,85	0,05
	Total	116.063	100,00

Sumber: Malaka dalam Angka (Data diolah)

3. Potensi Wilayah

1) Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Kawasan pertanian di Kabupaten Malaka didominasi oleh pertanian lahan kering dengan luasan mencapai 53.911 ha. (Data Dinas Pertanian Kab. Malaka) yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering, hortikultural, tanaman palawija dan tanaman tahunan.

Potensi perkebunan yang ada saat ini berupa kelapa, jambu mete, kakao, kemiri, kapuk, pinang, sirih, tembakau. Sedangkan potensi peternakan berupa kuda, kambing, babi, sapi dan kerbau.

2) Perikanan

Kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Malaka terdapat di wilayah perairan laut di sepanjang pesisir pantai ±82,94 km terdapat di wilayah Kecamatan Wewiku, Malaka Barat, Malaka Tengah, Kobalima dan Kobalima Timur.

Jenis ikan tangkap di Kabupaten Malaka diantaranya : Tuna, Cakalang,

Tongkol, Tenggiri, Alu-Alu, Gergahing, Kakap Merah, Kakap Putih, Kerapu Lumpur, Kerapu Karang, Kerapu Balong, Kerapu Sunu, Kerapu Bebek, Cendro, Tetengkek, Kembang, Terbang, Belanak, Tembang, Tembang Kobi, Tembang Kaleng, Julung-Julung (Nipi), Golok-Golok, Terubuk, Lemuru, Lemadang, Lencam, Biji Nangka, Kurisi, Swanggi, Serinding Tembakau, Layang, Kwee, Talang-Talang, Pinjalo, Jenaka, Bentong, Gerot-Gerot, Selanget, Baronang, Selar, Teri, Paperek, Pari, Manyung, Merah Bambang, Kakap/Baramundi Bream, Ekor Kuning, Cucut, Layar, Parang-Parang, Madidihang.

3) Pertambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Malaka meliputi :

- a. Pertambangan mineral logam; seperti Emas sekunder (Placer) terdapat di Kecamatan Laen Manen dan Botin Leobele (Kereana)
- b. Pertambangan mineral bukan logam; seperti Gypsum lokasinya tersebar di Seluruh kecamatan di Kabupaten Malaka.
- c. Potensi pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Laen Manen, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Io Kufeu, Kecamatan Sasitamean, Kecamatan Botin Leobele, Kecamatan Rinhat, Kecamatan Weliman dan Kecamatan Wewiku.
- d. Rembesan minyak terdapat di Kecamatan Kobalima di Morukren, Malaka Tengah dan Malaka Barat.
- e. Tambak garam dengan potensi ± 2.443 ha yang sudah dikelola investor PT. Inti Daya Kencana seluas ± 400 ha. PT. Inti Daya Kencana adalah sebuah cabang perusahaan asing dari Jepang. Potensi garam tersebar di wilayah Kecamatan Kobalima, Malaka Tengah, Malaka Barat dan Wewiku.
- f. Pertambangan batuan seperti :

- a) Mangan terdapat di Kecamatan Malaka Timur , Kobalima Timur, Kobalima, Io Kufeu, Sasitamean, Laen Manen, Botin Leobebe, Malaka Tengah dan Rinhat.
 - b) Batu marmer terdapat di Kecamatan Malaka Timur, dan Kobalima;
 - c) Batu lempung lokasinya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Malaka.
 - d) Batu gamping di Kecamatan Malaka Timur dan Malaka Tengah, Sasitamean, dan Laen Manen,
 - e) Batu setengah permata tersebar di sepanjang sungai di Kabupaten Malaka
- 4) Pariwisata
- Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Malaka meliputi peruntukan pariwisata budaya,pariwisata alam dan pariwisata buatan.
- a. Pariwisata budaya di Kabupaten Malaka, seperti :Rumah Adat Loro Dirma di Kecamatan Malaka Timur, Perkampungan Adat Kamanasa dan Tafatik Laran di Kecamatan Malaka Tengah, Perkampungan Adat Bolan di Kecamatan Malaka Tengah, Perkampungan Adat Haitimuk di Kecamatan Weliman, Perkampungan tradisional di Desa Loomota.
 - b. Pariwisata alam di Kabupaten Malaka terdapat di beberapa kecamatan, seperti :
 - a) Kecamatan Kobalima: Masin Lulik, Cagar Alam Maubesi, Kelelawar Hasan Maubesi;
 - b) Kecamatan Weliman: Mata Air Weliman.
 - c) Kecamatan Wewiku : Pantai Teberek
 - d) Kecamatan Botin Leobebe: Danau Mantasik
 - e) Kecamatan Malaka Tengah : Pantai Motadikin
 - f) Kecamatan Malaka Barat: Pantai Beirasi, Pantai Abudenok;
 - g) Kecamatan Rinhat: Obyek Wisata Nanebot (wematan maromak)
 - h) Kecamatan Kobalima Timur : Hutan Saluhu

- c. Pariwisata buatan di Kabupaten Malaka, seperti : Gua Lourdes Kamanasa terletak di Kecamatan Malaka Tengah dan Gua Maria Loro Haitimuk terletak di Kecamatan Weliman.

C. Jumlah Pegawai

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok pelayanan SKPD, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki jumlah tenaga sebanyak 11 orang PNS dan Tenaga Kontrak Daerah 13 orang, terdiri dari :

Tabel 1.4
Jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	PNS	TENAGA KONTRAK
S3		
S2	3	
S1	6	
D4		
D3		
D2		
D1	1	
SLTA	2	3
SLTP		
SD		
JUMLAH	12	3

Tabel 1.5
Jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pangkat dan Golongan

PANGKAT	GOLOGAN	RUANG	PNS
JURU MUDA	I	A	
JURU MUDA TINGKAT I	I	B	
JURU	I	C	
JURU TINGKAT I	I	D	
PENGATUR MUDA	II	A	
PENGATUR MUDA TINGKAT I	II	B	
PENGATUR	II	C	1

PENGATUR TINGKAT I	II	D	1
PENATA MUDA	III	A	6
PENATA MUDA TINGKAT I	III	B	
PENATA	III	C	1
PENATA TINGKAT I	III	D	
PEMBINA	IV	A	3
PEMBINA TINGKAT I	IV	B	
PEMBINA UTAMA MUDA	IV	C	
PEMBINA UTAMA MADYA	IV	D	
PEMBINA UTAMA	IV	E	
JUMLAH			12

Tabel 1.6

Jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Jabatan

JABATAN	PNS
KEPALA DINAS	1
SEKRETARIS DINAS	1
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	1
KEPALA SEKSI PIKP/FUNGSIONAL PRANATA HUMAS	
STAF/PELAKSANA	8
JUMLAH	12

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.6
Realisasi Anggaran dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka

No	Detail Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian %
Belanja		Rp 1,516,291,710	Rp 1,689,258,010	86%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 1,227,322,130	Rp 1,367,427,480	90%
2	Belanja Langsung	Rp 288,969,580	Rp 321,830,530	84%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 1,346,264,710	Rp 1,122,116,857	76,35%
A	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 1,281,322,130	Rp 1,055,151,805	75,22%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1,170,322,130	Rp 966,651,805	73,55%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 54,000,000	Rp 31,500,000	100%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 57,000,000	Rp 57,000,000	100%
B	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp 8,778,980	Rp 10,812,980	99,99%
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 502,390	Rp 898,250	99,98%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 5,019,840	Rp 6,657,000	99,99%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 3,526,750	Rp 3,526,750	100%
C	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 7,258,000	Rp 7,250,000	99,89%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3,058,000	Rp 3,050,000	99,74%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 4,200,000	Rp 4,200,000	100%
D	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 48,905,600	Rp 48,905,052	99,99%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 47,405,600	Rp 47,403,052	99,99%
2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	100%

No	Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Rp 50,932,000	Rp 109,114,138	99,71%
A	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 50,932,000	Rp 109,114,138	99,71%
	1	Pelayanan Informasi Publik	Rp 50,932,000	Rp 79,181,600	100%
	2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 0	Rp 29 932,538	98,96%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Rp 119,095,000	Rp 116,111,680	99,30%
A	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN		Rp 119,095,000	Rp 107,271,680	99,25%
	1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 119,095,000	Rp 107,271,680	99,25%
B	Pengelolaan <i>E-Government</i>		Rp 0	Rp 8,840,000	100%%
	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 0	Rp 8,840,000	100%

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Perangkat Daerah

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, dalam berbagai bidang. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan sebagian besar para futuristik mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Sementara itu dalam lingkup lokal Pemerintah Kabupaten Malaka, dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Pemerintah Kabupaten Malaka. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek infrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi.

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malaka merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat

sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e- government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Malaka.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah. Seiring sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Malaka Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka maka Diskominfo mempunyai fungsi Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika; Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika; Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika; Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika; Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Informasi dewasa ini merupakan kebutuhan utama. Hadirnya teknologi informasi sangat diidamkan oleh semua pihak. Namun demikian, seringkali informasi tersebut tidak terkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kebutuhan akan informasi mutlak dibutuhkan di era modernisasi. Optimalisasi pengelolaan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan

menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu penguasaan SDM akan pengelolaan informasi terbaru juga memberikan manfaat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dijumpai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Permasalahan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatasnya SDM di bidang IT	Keterbatasan SDM menyebabkan terhambatnya realisasi program-program kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka
	Tidak memadainya Peralatan	Keterbatasan Perangkat Pendukung Bidang IT	Masih kurangnya peralatan IT yang mendukung Program Kerja Dinas Kominfo Kab.Malaka
	Belum tersedianya data base yang terpusat	Belum tersedianya data base sebagai implementasi E-Government atau SPBE	Masih belum adanya data base yang terpusat dalam menunjang implementasi E-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Keterbatasan Anggaran	Keterbatasan Pembiayaan dari Pemerintah Daerah	Masih terbatasnya alokasi APBD untuk pembiayaan Program kerja di Diskominfo Kab.Malaka

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum tersedianya gedung perkantoran	Masih belum adanya gedung kantor yang memadai	Belum tersedianya Gedung kantor yang baik dan memadai untuk menunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

B. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah atau tindakan yang akan di ambil untuk menjabarkan kebijakan meliputi keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur serta Sarana dan Prasarana. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka Dinas Komunikasi, Informatika, Kabupaten Malaka mengangkat program-program Operasional yang implementasinya tertuang dalam bentuk kegiatan atau aktifitas yang merupakan cerminan dari strategi Dinas untuk di implementasikan dengan sebaik-baiknya demi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, sesuai kondisi dan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang ada.

Adapun Program/kegiatan demi menunjang Pembangunan di Wilayah Kabupaten Malaka yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Peningkatan pengelolaan informasi
2. Peningkatan komunikasi publik
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika

Berdasarkan Program yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Malaka, maka dirumuskan kebijakan, yang meliputi :

1. Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah
2. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media
3. Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi

4. Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik
6. Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government
7. Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur
8. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung e-government
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana telekomunikasi
10. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

Tabel 1.8

Program Prioritas Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Malaka

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	1	48 OPD	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jaringan TIK serta Peningkatan Pengelolaan Website Kabupaten dan Sub Domain OPD	Peningkatan Penyediaan dan Perluasan Jaringan TIK dalam Pelayanan Publik serta Publikasi Data Informasi Pembangunan Kabupaten Malaka
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	48 OPD	1	Pembangunan Pusat Data (Data Center) Kabupaten Malaka	Penyediaan Satu Data Indonesia Kabupaten Malaka
			48 OPD	2	Optimalisasi Pengelolaan PPID di masing-masing OPD	Peningkatan Layanan PPID

3	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1	38 Base Tranceiver Station	1	Penerapan Retribusi Menara Telekomunikasi/BTS	Retribusi Base Tranceiver Station
---	-------------------------------------	---	----------------------------	---	---	-----------------------------------

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Per kapita			
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Adapun Pencapaian Program Kerja Urusan Pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Sebagai Berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Outcome	Capaian Kinerja
1.	Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/kota	Tersedianya Website Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikelola Dinas Kominfo	YA Dinas Kominfo Kab.Malaka melalui Bidang Aplikasi Informatika mengelola Website Pemerintah dengan alamat http://www.malakakab.go.id
			YA

No	Urusan Pemerintahan	Outcome	Capaian Kinerja
2.		Tersedianya Informasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang di Publikasi Oleh Dinas Kominfo	Pengelolaan Informasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malaka dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang tersedia pada laman web : http://www.malakakab.go.id
3.		Tersedianya Akses Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang pengelolaannya melalui Dinas Kominfo	YA Akses Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Malaka telah tersedia di 38 titik dengan 2 Provider yaitu Telkomsel dan XL yang dibawah pengawasan dan kontrol oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malaka
4.		Tersedianya Akses Internet di Wilayah PEmerintah Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Dinas Kominfo	YA Akses Internet telah tersedia di 11 Kecamatan wilayah Pemerintah kabupaten Malaka dengan jumlah sebarannya yaitu 38 titik BTS dan 98 titik Internet Gratis
5.		Presentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	<u>38 OPD/6 OPD*100%</u> = 6,3 %
6.		Presentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	38 OPD/0 OPD*100% = 0 %
7.		Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang	Tidak Belum adanya perangkat server penunjang dan SDM

No	Urusan Pemerintahan	Outcome	Capaian Kinerja
		disediakan Dinas Kominfo	yang memadai dalam pengelolaan Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah
8.		Presentase Perangkat Daerah yang memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai standar	$38 \text{ OPD}/6 \text{ OPD} * 100\%$ = 6,3 %
9.		Presentase Layanan SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Tidak Belum adanya perangkat penunjang dan SDM yang memadai
10.		Presentase Layanan SPBE yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik	Tidak Belum adanya Perangkat Penunjang dan SDM yang memadai
11.		Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah	$38 \text{ OPD}/0 \text{ OPD} * 100\%$ = 0 %
12.		Tersedianya Satu Data Pemerintah Kabupaten/Kota yang disediakan Dinas Kominfo	Tidak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka sebagai Wali Data Pemerintah Kabupaten Malaka telah melakukan Perencanaan Pembentukan Tim Malaka Satu Data melalui sinkronisasi Program Satu Data Indonesia
13.		Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi <i>e-government</i>	YA Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 7 tentang Pedoman Pengelolaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Malaka

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja

Dalam melaksanakan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika menyelesaikan beberapa program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	100%	86%
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	87%

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 2 Program yang terdiri 18 Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Target
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,439,241,931	Rp 1,112,857	

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Target
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1,314,311,452	Rp 966,651,805	Meningkatkan motivasi tenaga kerja ASN di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Malaka dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kerja.
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 958,899	Rp 31,500,000	Meningkatkan kinerja ASN karena tersedianya administrasi pelaksanaan tugas.
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 57,000,000	Rp 57,000,000	Tersedianya data keuangan yang valid di Diskominfo kab. Malaka
4	Penyediaan Peralatn Rumah Tangga	Rp 898,390	Rp 898,250	Meningkatkan Capaian Kinerja di Lingkungan Diskominfo, Kab. Malaka
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 6,657,840	Rp 6,657,000	Terlaksananya tugas kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan dokumen pelaporan, surat menyurat serta database organisasi perangkat daerah tahun 2022
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 3,256,750	Rp 3,256,750	Terlaksananya kegiatan penggandaan dokumen dan penatausahaan dokumen tahun 2022 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3,058,000	Rp 3,050,000	Tercapainya kinerja yang optimal dalam urusan komunikasi dan informatika di Diskominfo Malaka
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 4,200,000	Rp 4,200,000	Pencapaian kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka terealisasi secara efektif dan diharapkan mencapai target sesuai dengan perencanaan
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 47,405,600	Rp 47,403,052	Kegiatan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga capaian kinerja di Diskominfo Malaka dapat menjadi optimal

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Target
13	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Capaian kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika meningkat oleh karena sarana pendukung dapat dimanfaatkan secara maksimal
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota	Rp 109,428,950	Rp 109,114,138	
1	Pelayanan Informasi Publik	Rp 79,182,000	Rp 79,181,600	Terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat kabupaten malaka terkait dengan kegiatan pembangunan Kabupaten Malaka melalui kegiatan-kegiatan kerja Pemerintahan
2	Penguatn Kapasiats Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 30,246,950	Rp 29,932,538	Tersedianya sumber daya yang memadai dalam menjalankan tugas komunikasi dan informatika di Diskominfo Malaka
III	Program Aplikasi Informatika	Rp 116,925,000	Rp 116,111,680	
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 108,805,000	Rp 107,271,680	Tersedianya sarana pendukung berupa aplikasi dan akses jaringan di lingkungan kerja Pemerintahan Kabupaten Malaka dalam mendukung kegiatan kerja Pemerintahan
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 8,840,000	Rp 8,840,000	Tersedianya data Base Transceiver Station sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penagihan Retribusi Pengawasan Tower

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Adapun pengukuran capaian kinerja berdasakaran perbandingan capaian tahun sebelumnya terdapat kenaikan presentase capaian dari 2 Program yang ada di Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka, Rincian Pengukuran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan capaian tahun sebelumnya

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	86%	77,76%
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	87%	99,71%
3	Program Aplikasi Informatika	Presentase Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0	99,30%

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian/ LPNK	Peraturan Menteri/LPNK No. Ttg.	Program Kegiatan Luaran Output Kegiatan								
2											
3	dst										

3.1. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota

3.1.1. Target Kinerja

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang	Peraturan Gubernur No. Ttg.	Program Kegiatan Luaran Output Kegiatan								
2											
3	dst..										

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

Nihil

4.2. Urusan Kesehatan

Nihil

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

Nihil

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Nihil

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Nihil

4.6. Urusan Sosial

Nihil

BAB V PENUTUP

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka dalam melaksanakan Operasional Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, mengacu pada tugas dan fungsinya, serta menyesuaikan pada tujuan dan kondisi yang ada sehingga peran operasionalnya melaksanakan pembangunan secara fisik, berupa infrastruktur TIK dan membangun sikap mental masyarakat yang mengarah pada terciptanya sikap partisipasi aktif, kesadaran dan positif dalam menyikapi pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya kondisi masyarakat yang semakin meningkat kualitas hidupnya dan menjadi SDM yang produktif.

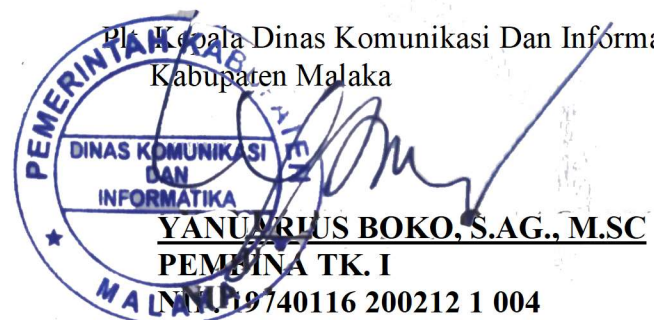
Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka Tahun 2022 secara umum berjalan dengan baik, dengan penyerapan anggaran sebesar 90%.

Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika masih sangat diperlukan pengembangan-pengembangan program kerja yang lebih baik, oleh karenanya dalam pelaksanaannya masih sangat diharapkan kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak demi terselenggaranya Program Kerja yang produktif dan efektif.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka Tahun 2022 kami sampaikan, Apabila terdapat kekurangan atas Laporan ini, kami mohon kritik dan saran dari seluruh perangkat terkait agar menjadi bahan evaluasi dalam pembuatan laporan di tahun-tahun berikutnya.

Betun, 1 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Malaka



YANUARIUS BOKO, S.A.G., M.SC
PEMBINA TK. I
N.N. 19740116 200212 1 004

